

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kontekstualisasi Gender dan Seksualitas dalam LGBTQIA+

Gender memiliki definisi yang beragam dan sangat kompleks, mengingat sifat dari gender yang akan selalu berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Secara umum, gender dapat didefinisikan sebagai bentuk dari perilaku, peran, aktivitas, serta atribut yang melekat baik pada pria, wanita, atau identitas lainnya di ranah sosial. Gender memiliki definisi yang berbeda dengan *sex* atau jenis kelamin, dimana jenis kelamin sendiri merupakan identitas yang melekat sejak lahir, sedangkan gender merupakan suatu konstruksi sosial masyarakat (WHO, 2012). Gender dalam mayoritas kelompok sosial dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu laki-laki (*male*) dan Perempuan (*female*), atau dapat didefinisikan sebagai *gender binary*. Karena masyarakat kontemporer AS masih bertumpu pada asumsi bahwa hanya ada dua jenis kelamin yang eksklusif yaitu perempuan dan laki-laki, istilah *binary* menjadi suatu hal yang dapat “diterima oleh akal sehat” dalam budaya AS yang juga diikuti oleh negara-negara lainnya (Gosselin & Bombardier, 2019). Namun, seiring dengan perkembangannya, terdapat sekelompok masyarakat yang mengidentifikasi diri mereka sebagai individu yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi *gender binary*, oleh karena itu muncullah istilah kelompok *non-binary*. Istilah *non-binary* sendiri muncul karena berbagai faktor, dimana salah satunya adalah diagnosa *gender dysphoria*, yang merupakan salah satu istilah diagnostik yang mengacu pada ketidaknyamanan atau tekanan terus menerus yang terjadi Ketika jenis kelamin yang dimiliki seorang individu saat lahir tidak sesuai dengan pengalaman yang dirasakan oleh individu tersebut (Gosselin & Bombardier, 2019). *Gender dysphoria* ini kemudian juga menimbulkan suatu fenomena yaitu *transgender*, yang menjadi tindakan perubahan gender dari seorang individu yang merasa tidak cocok dengan jenis kelamin tradisionalnya.

Selain dari identitas gender, preferensi seksual juga menjadi salah satu klasifikasi individu yang berada di bawah payung agenda LGBTQIA+. Secara umum, preferensi seksual didefinisikan sebagai ketertarikan secara romantis, baik terhadap orang yang memiliki jenis kelamin yang berbeda (*heterosexual*), jenis kelamin atau gender yang sama (*homosexual/gay/lesbian*) atau ketertarikan terhadap kedua jenis kelamin atau gender lainnya (*bisexual*) (Eldridge, 2022).

Perkembangan dari gender dan seksualitas yang dicap sebagai suatu hal yang tidak masuk akal menimbulkan suatu fenomena yang disebut sebagai *homophobia* di masyarakat. Perilaku *homophobia* ini menimbulkan berbagai macam diskriminasi yang ditujukan terhadap kelompok LGBTQIA+. Tidak begitu banyak studi yang membahas mengenai asal mula perilaku *homophobia* ini secara sosial, sering kali dijelaskan bahwa hal ini merupakan suatu ekspresi atau sikap negatif suatu individu terhadap kelompok yang dianggap “minoritas”, dimana sikap negatif itu sendiri berasal dari bentuk-bentuk kepercayaan “tradisional” seperti agama. Kemudian tekanan-tekanan ini membentuk suatu dorongan dari pergeseran *political movement* yang bertujuan untuk menghentikan diskriminasi terhadap kelompok minoritas (kelompok LGBTQIA+), serta memunculkan adanya klaim dan identitas politik yang positif di Barat. Salah satu contoh atau bukti dari adanya *political shift* dalam diskursus LGBTQIA+ ini adalah penerimaan terhadap kelompok tersebut berupa pembentukan *legal law* yang memberikan proteksi terhadap kelompok LGBTQIA+ baik secara identitas gender maupun preferensi seksual dari seorang individu (Rahman, 2019). Saat ini, individu *non-binary* serta kelompok *transgender* memiliki perlindungan hukum tersendiri di berbagai negara, terutama AS (Levin, 2017), sedangkan individu atau kelompok *gay* telah diberikan legalitas oleh AS sejak tahun 1961 di Illinois (Harrington, 2010).

B. LGBTQIA+ Sebagai Agenda Politik AS.

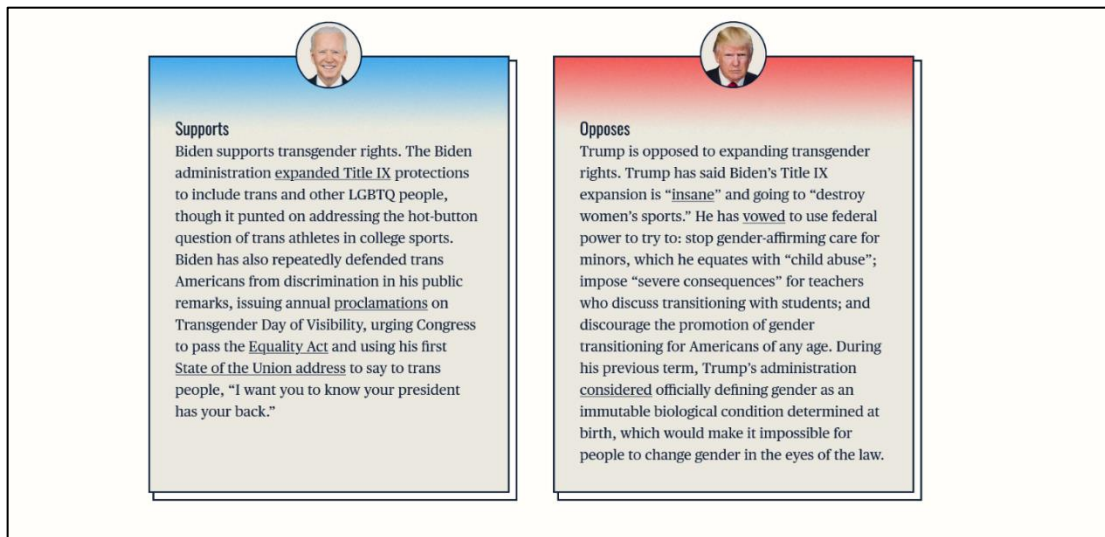
Hak Asasi Manusia merupakan salah satu diskursus dan ciri khas yang melekat pada wacana politik liberal Barat, yang dapat memberikan hak-hak politik terhadap subjek-subjek tertentu yang telah diakui oleh suatu komunitas politik (seperti negara) sebagai manusia. Dalam konteks ini, “manusia” awalnya dapat didefinisikan sebagai laki-laki borjuis berkulit putih, beragama Kristen, dan heteroseksual. Namun seiring dengan perkembangannya, definisi ini pun diperluas hingga mencakup beberapa kategori lainnya seperti perempuan, anak-anak, agama, etnis dan ras minoritas. Perluasan ini dilakukan karena kelompok-kelompok tersebut dianggap ‘berbeda’ dengan wacana politik yang telah dibentuk oleh negara-negara Barat, dimana mereka memiliki perjuangan tersendiri untuk pada akhirnya dapat diberikan definisi sebagai “manusia” dalam hak asasi manusia itu sendiri. Perjuangan ini juga menjadi simbol perjuangan bagi kelompok *gay, lesbian, biseksual, transgender, queer, interseksual* dan *aseksual* (LGBTQIA+) (Weber, 2016). Dekriminalisasi kelompok LGBTQIA+ AS dimulai pada tahun 1961 di Illinois (Harrington, 2010). Dekriminalisasi ini selanjutnya

berkembang menjadi hukum-hukum lainnya seperti proteksi, jaminan medikasi, hingga edukasi di beberapa jenjang pendidikan (Epstein, 2024).

Tidak dapat dipungkiri, bahwa pengaruh kelompok LGBTQIA+ selaku kelompok termarginalisasi berada dalam skala yang besar dan tidak dapat dibendung. Dukungan dari publik terhadap kelompok LGBTQIA+ secara politik meningkat secara drastis dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan survei, pada tahun 2004, hanya 31 persen orang AS yang mendukung pernikahan sesama jenis, dan pada tahun 2014 hampir seluruh penduduk AS memberikan dukungan penuh terhadap pasangan sesama jenis. Peningkatan ini tidak hanya ada dalam hal akseptansi dari kelompok mayoritas atau non-LGBTQIA+ (yang dapat disebut sebagai *ally*), namun juga terdapat pada individu dalam kelompok tersebut. Peningkatan signifikan terdapat pada individu gay secara signifikan terjadi bersamaan dengan peningkatan akseptansi kelompok LGBTQIA+ di tengah-tengah masyarakat (Bishin et al., 2021).

Selain peningkatan yang terjadi di ranah sosial masyarakat, peningkatan akseptansi dan keterbukaan ini juga terjadi di ranah politik dan pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya keterlibatan individu LGBTQIA+ dalam ranah politik. Jumlah pejabat terpilih LGBTQIA+ meningkat sebanyak 6% pada tahun 2021. Peningkatan ini terjadi sejak tahun 2017, dimana hal ini ditandai dengan banyaknya keikutsertaan individual LGBTQIA+ terutama individu *gay* dan *transgender* ke dalam jajaran politik pemerintahan AS (Moreau, 2022). Eksklusifitas peningkatan normalisasi dan legalisasi politik LGBTQIA+ terjadi pada masa pemerintahan presiden Joe Biden. Jika dibandingkan dengan masa pemerintahan presiden Trump, kebijakan domestik terkait LGBTQIA+, kebijakan yang dimiliki Joe Biden dapat dikatakan lebih fleksibel dan lebih terbuka, meskipun keduanya telah memberikan akseptansi terhadap kelompok LGBTQIA+, kebijakan yang dimiliki Trump cenderung memilih untuk mendefinisikan gender sebagai kondisi biologis yang tidak dapat diubah dan ditentukan pada saat lahir, sedangkan Biden memberikan proteksi yang ketat terhadap kelompok LGBTQIA+ (Allen et al., 2024).

Gambar 1. Perbandingan kebijakan terhadap kelompok LGBTQIA+ pada masa pemerintahan Trump dan Joe Biden



Sumber: Allen et al., (2024)

Selain legalitas dalam bentuk kebijakan, legalitas juga diberikan dalam bentuk pembentukan organisasi pemerintahan serta berbagai NGO di AS. Pembentukan organisasi ini merupakan salah satu bentuk pertumbuhan akseptansi kelompok LGBTQIA+ di AS secara signifikan. Organisasi-organisasi tersebut bekerja di multi sektor seperti kesehatan, perlindungan dalam media dan *entertainment* (GLAAD), edukasi (GLSEN atau *Gay, Lesbian & Straight Education Network*) serta sektor-sektor lainnya. Selain NGO, AS juga membentuk beberapa organisasi pemerintahan yang berfokus pada isu-isu terkait LGBTQIA+ seperti *Global Equality Fund*, dan GLIFAA (*Gays and Lesbians in Foreign Affairs Agencies*).

Posisi Joe Biden sebagai pemimpin negara AS memperkuat status akseptansi bahkan normalisasi kelompok LGBTQIA+ dalam ranah domestik hingga internasional. *Memorandum on Protecting Rights of LGBTQ People Abroad* yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2021, menjadi salah satu titik berat dari seruan untuk memberikan akseptansi terhadap kelompok LGBTQIA+ secara Internasional, dan menjadi penanda bahwa akseptansi LGBTQIA+ menjadi salah satu hal yang mutlak untuk dilakukan, baik secara domestik maupun Internasional (The White House, 2021). Memorandum ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu momentum persinggungan dalam komunikasi politik LGBTQIA+ antar Amerika Serikat dan Rusia.

Penyebaran akseptansi LGBTQIA+ ini kemudian turut dibantu dengan adanya kelompok-kelompok seperti NGO, yang turut mempromosikan agenda akseptansi LGBTQIA+ secara global oleh AS. Politik LGBTQIA+ sendiri didukung oleh LSM-LSM barat (seperti GLAAD, GLESN dan organisasi-organisasi lainnya) yang turut dibantu oleh adanya gerakan LGBTQIA+ lokal membentuk pola politik transnasional yang majemuk, kemudian menciptakan suatu bentuk aturan baru mengenai cara negara mengatur dan melindungi negaranya. Politik LGBTQIA+ milik AS selanjutnya mempromosikan bahwa individu-individu yang termasuk ke dalam golongan LGBTQIA+ bukanlah minoritas yang hina, namun sebagai pembawa hak asasi manusia dengan harkat dan martabat yang harus dihargai, dan sebagai salah satu simbolisasi dari “kebebasan berekspresi” (Thiel, 2014).

Terdapat beberapa motif yang kemudian menyebabkan mengapa Joe Biden meningkatkan *awareness* terhadap kelompok LGBTQIA+. Beberapa diantaranya adalah adanya kecenderungan perdebatan publik terhadap isu akseptansi LGBTQIA+ serta adanya motif kultural dan politik dalam peningkatan hegemoni AS.

a. Perdebatan publik dalam akseptansi LGBTQIA+

Konservatifisme merupakan salah satu penghambat akseptansi LGBTQIA+ secara publik. Beberapa kelompok LGBTQIA di beberapa negara (terutama Rusia) masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas masyarakat. Terdapat beberapa alasan yang dapat memberikan justifikasi terhadap penolakan kelompok LGBTQIA+, beberapa di antaranya adalah keterikatan ajaran agama dan norma dalam kebijakan, kondisi ekonomi di suatu negara, dan demokrasi (Adamczyk, 2019). kelompok LGBTQIA+ masih menghadapi hambatan dan diskriminasi di berbagai bidang seperti pekerjaan, perumahan, akomodasi publik, dan lainnya (Medina et al., 2021).

Selain tekanan sosial terhadap kelompok LGBTQIA+, pertentangan akseptansi juga terdapat di beberapa negara secara legal, dalam konteks ini, diskriminasi terhadap kelompok LGBTQIA+ menjadi suatu hal yang diperbolehkan atas asas ajaran agama, atau berdasarkan pada kepercayaan yang dianut mayoritas di negara tersebut, dan menjadi ketetapan hukum di negara tersebut (Davidson, 2022). Diskriminasi semacam ini pun membuktikan bahwa ancaman yang diterima oleh kelompok LGBTQIA+

terdapat pada level yang luar biasa. Adanya diskriminasi yang terus menerus terjadi ini kemudian memberikan motivasi pemerintah AS untuk meningkatkan keamanan bagi kelompok LGBTQIA+ secara domestik hingga internasional.

b. Motif Kultural dan Politik Dalam Hegemoni Amerika Serikat

AS selaku pemimpin dari tatanan liberal internasional yang muncul setelah Perang Dingin pada awalnya membantu menyebarkan nilai-nilai liberal, termasuk hak-hak LGBTQIA+, melalui jaringan aktivis transnasional dan lembaga-lembaga yang didukung oleh Barat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, penurunan hegemoni AS terjadi bersamaan dengan penolakan terhadap hak-hak LGBTQIA+ di beberapa negara. Ketika kepemimpinan global AS terurai, beberapa jaringan transnasional yang tidak liberal dan sayap kanan turut menantang norma-norma liberal, termasuk hak-hak LGBTQIA+ (Cooley & Nexon, 2020).

Adanya penurunan pengaruh hegemoni ini kemudian mengubah arah “promosi” politik AS, dimana akseptansi LGBTQIA+ menjadi salah satu agenda utama dalam promosi tersebut. Secara historis, bahasa dan diskursus dalam masyarakat memegang peranan besar dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap kelompok LGBTQIA+. AS pada akhirnya melakukan promosi akseptansi melalui media-media populer. Representasi kelompok LGBTQ di media-media populer AS, khususnya film, music atau *series* remaja, telah menjadi situs negosiasi ideologis. Representasi dalam media populer mencerminkan perjuangan hegemonik yang sedang berlangsung atas norma-norma dan nilai-nilai sosial (Macrae, 2018).

C. Rusia dan Agenda Politik LGBTQIA+

Beragamnya orientasi seksual masyarakat yang terus-menerus berkembang menjadikan semakin besarnya akseptansi kelompok ini di berbagai negara. Negara-negara liberal seperti AS, dan beberapa negara liberal lainnya juga turut melegalkan perilaku LGBTQIA+ di negaranya secara hukum, dan turut menjadikan LGBTQIA+ sebagai salah satu kepentingan politik negaranya. Tetapi, akseptansi kelompok LGBTQIA+ menjadi suatu hal yang mustahil untuk dicapai di Rusia. Eksistensi hukum atau undang-undang “*gay propaganda*” yang sudah diresmikan dan tentunya diterapkan sejak tahun 2013 di Rusia menjadi bukti nyata akan adanya krisis

akseptansi kelompok LGBTQIA+ di negara tersebut (Thoreson, 2015). Secara historis, Rusia dikenal dengan perbedaan arah ideologi politik dengan negara-negara liberal seperti Amerika Serikat. Undang-undang “*gay propaganda*” milik Rusia kemudian menjadi contoh dari homophobia dalam aspek politik, dimana negara membuat kelompok-kelompok minoritas yang kegiatan atau kepercayaannya berasaskan pada gender dan seksualitas sebagai target untuk membuat suatu keuntungan politik bagi negaranya, yang dalam hal ini ditujukan untuk menarik perhatian masyarakat global. Dalam tingkat internasional, undang-undang ini kemudian dapat membantu Rusia menjadi juara dalam hal negara yang menjunjung tinggi “*traditional values*” atau nilai-nilai tradisional yang konservatif (Rajvanshi, 2022).

Isu LGBTQIA+ atau homoseksual di Rusia tidak semata-mata menjadi isu *high politics* atau hanya berpengaruh dan dipengaruhi oleh pemerintah di negara saja, melainkan isu ini timbul dan juga berkembang di kalangan masyarakat. Ditinjau dari aspek masyarakat, LGBTQIA+ di Rusia pada dasarnya sudah ada di tengah-tengah masyarakat sejak lama, berkembang dan membentuk sebuah komunitas yang berfungsi untuk memperjuangkan akseptansi dan legalitas LGBTQIA+ di negara tersebut. Evolusi akseptansi dan legalitas LGBTQIA+ di Rusia menjadi suatu hal yang fluktuatif, dilihat dari beberapa kemajuan dan kemunduran akan hukum LGBTQIA+ di Rusia hingga saat ini. Dilihat dari aspek sejarahnya, hukum untuk perilaku homoseksualitas di Rusia telah diterapkan sejak era kebudayaan Slavia Pra-Modern (sekitar tahun 900-1700), dimana hukum ini diterapkan dengan tujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat. Hukum di Rusia terdahulu juga secara jelas memberikan dikte akan seksualitas dari masyarakatnya, dimana hal ini juga sekaligus memberikan pengelompokan peran wanita dan pria di masyarakat umum. Hal yang menarik dari perkembangan hukum anti-LGBTQIA+ Rusia adalah bagaimana Rusia menjelaskan bahwa hukuman hanya berlaku bagi perilaku *gay* atau homo, sedangkan perilaku lesbian hanya dianggap sebagai suatu penyakit yang bisa diobati (Batueva & Đorđević, 2017).

Kebebasan LGBTQIA+ juga pernah diberlakukan di Russia pada saat berdirinya Uni Soviet, dimana hukum-hukum anti perilaku homoseksual serta hukum-hukum yang terkait dengan seksualitas masyarakat dihapuskan, dan diubah menjadi dilegalkan. Meskipun dilegalkan, hukum terkait kebebasan LGBTQIA+ ini kemudian tidak mendapatkan respons yang baik dari masyarakat, dimana beberapa kelompok

masyarakat masih melakukan diskriminasi terhadap kelompok LGBTQIA+, dan sering kali menolak untuk mempekerjakan para pria *gay*, atau para pria yang memiliki sifat feminim (cenderung ditandai dengan cara berpakaian, atau perilaku) (Khoroshilova, 2017).

Tepat pada masa pemerintahan partai komunis yang dipimpin oleh Gorbachev, Rusia menjadi negara yang terbuka, ditandai dengan kampanye kebijakan yang diberi nama *glasnost and perestroika*. Dua aspek yang menjadi fokus dari kebijakan ini adalah keterbukaan, baik dari aspek informasi dunia luar (*glasnost*) serta aspek restrukturisasi ekonomi dan sistem politik (*perestroika*), dimana kedua istilah ini kemudian dianggap dapat membuka peluang demokratisasi Uni Soviet sekaligus membuka peluang untuk restrukturisasi ekonomi dan sistem politik komunis di negara tersebut (Waxman, 2022). *Euphoria* akseptansi LGBTQIA+ (terutama hubungan homoseksual) kemudian tidak bertahan lama. Setelah berakhirnya pemerintahan partai komunis di Rusia, dan terbentuknya pemerintahan di bawah rezim Stalin, hubungan homoseksualitas dan hal-hal terkait kembali menjadi suatu hal yang dianggap buruk, dan bahkan menjadi tindakan kriminal di berbagai lapisan masyarakat. Setelah tahun 1934, hukum anti LGBTQIA+ dan perilaku homoseksual kembali diterapkan, dan tentunya perilaku homoseksual menjadi suatu tindakan kriminal di seluruh penjuru Uni Soviet pada saat itu (Engelstein, 1995).

Hingga saat ini, Putin terus-menerus memberikan Internasionalisasi atau penambahan hukum baru mengenai kriminalisasi LGBTQIA+ di Rusia. Beberapa Internasionalisasi anti-LGBTQIA+ di bawah pemerintahan Putin antara lain;

Pertama, dalam rencana Internasionalisasi anti-LGBTQIA+ yang telah diinisiasi sejak tahun 2014, Rusia menyatakan bahwa perilaku homoseksual merupakan hal yang menyimpang dan menjadi suatu tindakan kriminal di Rusia. Hukum anti-LGBTQIA+ atau disebut juga sebagai hukum melawan propaganda hubungan seksual non-tradisional yang kemudian sekaligus menjadi titik berat terjadinya perang *International Culture over LGBTQIA+ rights* (Picq & Thiel, 2015). Internasionalisasi ini ditujukan untuk melindungi anak-anak di bawah umur dari pengaruh-pengaruh kelompok LGBTQIA+ yang dianggap berbahaya (Davis, 2023).

Kedua, pada tahun 2022, Rusia memberikan penekanan berupa pembatasan yang ditujukan pada media-media baik edukasi maupun hiburan seperti film, buku,

teater, pentas seni, dan hal-hal semacamnya yang mengandung unsur-unsur “*gay propaganda*”. Putin memutuskan untuk memberikan hukuman yang lebih berat bagi siapa saja yang berusaha menyebarkan luaskan ajaran atau informasi terkait LGBT secara privat atau publik, terutama bagi anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun, dan secara tidak langsung juga menunjukan hukum tersebut terhadap hampir keseluruhan masyarakat Rusia. Pada tahap ini, dapat dipahami bahwa penyebaran media atau informasi yang mengandung unsur-unsur homoseksualitas atau *gay propaganda* akan dianggap sama dengan penyebaran media pornografi atau pedofilia (AP News, 2022).

Kemudian, pada tahun 2023, Rusia menetapkan kelompok LGBTQIA+ sebagai kelompok ekstremis yang dapat mengancam kedaulatan negara. Hukum ini ditetapkan untuk membangun citra politik yang lebih baik, serta memberikan proteksi penuh untuk masyarakat secara umum terutama anak-anak (Burga, 2023). Rusia akan memberikan sanksi bagi siapa saja yang tergabung dalam kelompok LGBTQIA+ atau setiap individu yang memberi dukungan terhadap kelompok LGBTQIA+. Demonisasi kelompok LGBTQIA+ ini masih terjadi hingga saat ini dengan hukuman minimal 15 hari di penjara bagi individu yang terbukti mendukung kelompok LGBTQIA+.

Ada beberapa motif yang melatar belakangi hukum anti-LGBTQIA+ yang terus-menerus diperbaharui dan diperketat oleh pemerintah Rusia bahkan hingga saat ini, di samping dari pengaruh tensi perang dingin. Beberapa diantaranya adalah adanya ideologi konservatif dari sistem pemerintahan Rusia, serta peran ajaran agama Kristen Ortodox yang sangat kental dalam pembentukan hukum anti-LGBTQIA+ di Rusia.

a. Ideologi konservatif dalam pemerintahan Rusia

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum anti-LGBTQIA+ ini telah dijalankan semenjak pemerintahan Kremlin pada tahun 1934. Hal ini didorong oleh adanya nilai-nilai tradisional Rusia yang sangat kental dalam membentuk suatu hukum terkait dengan gender dan identitas di Rusia. Rezim Putin telah memberikan eksklusifitas khusus terhadap nilai-nilai tradisional Rusia, dimana Putin memperlakukan nilai tersebut sebagai *core* dalam penegakan hukum serta berbagai urusan internasional Rusia bahkan hingga saat ini (Edenborg, 2023). Pada tahun 2021, dalam forum *The 18th Annual Meeting of the Valdai Discussion Club*, dengan tema “*Global Shake-*

up in the 21st Century: The Individual, Values and the State” Putin memberikan penjelasan terbaru mengenai peran dari nilai-nilai tradisional dalam politik domestik serta Internasional Rusia. Ia memberikan karakterisasi bahwa masa kini sebagai suatu krisis dari pendekatan dan prinsip yang dapat menentukan eksistensi dari umat manusia (Stepanova, 2022).

Kemudian adanya dorongan dari kondisi geopolitik serta krisis COVID-19 pada saat itu juga menyebabkan rumitnya upaya untuk mempertahankan moral atau nilai-nilai tradisional bagi manusia. Hal ini juga menjadi salah satu pertanda akan adanya “*world-wide battle for values*” yang didefinisikan sebagai krisis oleh Putin yang dapat memengaruhi sisi “liberal” dan “tradisionalis”. Selain itu, Putin menjelaskan bahwa krisis ini menyebabkan perjuangan untuk nilai-nilai menjadi suatu hal yang sangat penting, namun di sisi lain Putin tidak dapat memaksakan nilai-nilai apa pun terhadap siapa pun, karena Putin menilai bahwa nilai tersebut merupakan produk unik dari perkembangan budaya dan Sejarah bangsa tertentu, dan bagi Putin, ketergantungan pada nilai-nilai spiritual Rusia, tradisi sejarah, dan budaya bangsanya yang multietnik merupakan ciri “konservatisme yang sehat” (Lukyanov, 2021).

Putin memandang nilai-nilai liberal yang dimiliki oleh AS dapat mengancam kedaulatan negara Rusia, serta memberikan pengaruh terhadap opini publik di berbagai sektor. Selanjutnya, karena berbagai alasan, Rusia merasa bahwa AS adalah lawan yang sepadan, sehingga dalam penegakkan hukumnya, Rusia selalu berpaku pada hal-hal yang bertentangan dengan apa yang telah dikeluarkan oleh AS (Alfarauqi, 2017). Adanya hegemoni AS yang sangat kuat kemudian memberikan dorongan terhadap Putin untuk memperkuat nilai-nilai tradisional Rusia.

Menurut *Report on the state of civil society in the Russian Federation* pada tahun 2022, terdapat beberapa poin yang menjadi kunci utama dalam nilai-nilai tradisional Rusia, diantaranya adalah *Preservation and Strengthening of traditional spiritual and moral values, Interethnic and religious diversity and unity, Family and childhood protection, Patriotic*

education, dan Protection and preservation of national treasure and historical and cultural heritage (Novoderezhkin, 2022).

1. *Preservation and Strengthening of traditional spiritual and moral values*

Topik pelestarian dan perlindungan nilai-nilai Rusia mulai berkembang secara berkelanjutan pada akhir dekade awal tahun 2000-an. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya ekspansi dari sistem dan nilai-nilai barat ke Rusia yang ditunjukkan dengan adanya pembentukan budaya *mass consumption* di Rusia. Berdasarkan pendapat para ahli, situasi tersebut dapat dikaitkan dengan *Lost Generation*, konflik identitas suatu generasi yang semakin meningkat, dan pertentangan nilai di dalam masyarakat Rusia (Novoderezhkin, 2022).

2. *Interethnic and religious diversity and unity*

Nilai agama menjadi suatu hal yang sangat kental dalam tata aturan dan kebijakan Rusia. Saat ini, asosiasi etnokultural dan agama, organisasi antar etnis, dan NGO-NGO terkait secara aktif berinteraksi dengan negara dalam berbagai *key national task*.

Di antara organisasi dan asosiasi publik tersebut, seperti Majelis Rakyat Rusia, Eurasia, perwakilan masyarakat adat, Gerakan Masyarakat Seluruh Rusia “Forum Senezh”, pusat-pusat budaya Rusia, etnovillages, rumah-rumah etnis dan pusat-pusat etnokultural di berbagai daerah di Rusia, serta sebagian besar organisasi nonpemerintah lain juga turut menangani masalah kebijakan nasional negara dan harmonisasi hubungan antar etnis (Novoderezhkin, 2022).

3. *Family and childhood protection*

Nilai-nilai keluarga serta perlindungan anak-anak menjadi salah satu aspek penting dalam nilai-nilai tradisional Rusia. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia menghadapi masalah yang cukup krusial di bidang demografi, dimana hal ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk yang rendah karena berbagai faktor seperti

pandemi covid, Tingkat kelahiran yang menurun serta faktor-faktor lainnya.

Federasi Rusia telah melakukan berbagai upaya yang komprehensif dengan skala yang besar dalam *key areas* dalam perlindungan anak dan keluarga, dimana hal ini bertujuan untuk mendorong angka kelahiran dan pengasuhan anak, sekaligus menjamin perlindungan mereka. Vladimir Putin menekankan bahwa perlu untuk mengembalikan tradisi historis keluarga besar, yang harus ditetapkan sebagai standar dan orientasi nilai bagi masyarakat dan prioritas terpenting bagi negara.

Saat ini, negara memberikan dukungan bagi perempuan selama kehamilan, persalinan dan kemungkinan merawat anak-anak jika sakit, membantu dalam pengasuhan dan pendidikan anak-anak dan menciptakan peluang untuk mengatur rekreasi mereka (Novoderezhkin, 2022). Selain untuk mendorong angka kelahiran, proteksi terhadap anak-anak dan keluarga juga ditujukan untuk melindungi kemurnian nilai tradisional dan menghindari adanya kemungkinan masuknya pengaruh-pengaruh yang tidak diinginkan, dimana dalam konteks ini adalah pengaruh-pengaruh ideologi barat seperti LGBTQIA+. Hal ini ditunjukkan dengan adanya berbagai Internasionalisasi terkait nilai-nilai dari ideologi barat, bahkan hingga menyeluruh (aturan-aturan terkait konsumsi media hiburan, berita, serta berbagai aturan lainnya yang secara langsung dikaitkan dengan penyebaran *gay propaganda*) (Davis, 2023).

4. *Patriotic education*

Adanya permintaan publik yang luas untuk pendidikan patriotik bagi anak-anak dan remaja telah terbentuk di negara Rusia selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, pembentukan dari *New Russian Movement of Children and Youth* yang didirikan oleh 26 asosiasi *public-state* dan asosiasi anak-anak dan remaja menjadi salah satu peristiwa penting dalam sektor ini (Novoderezhkin, 2022). Saat ini, pendidikan patriotik menjadi salah satu alat utama yang ditujukan

untuk pengembangan pendidikan di lembaga pendidikan umum dan kejuruan.

5. ***Protection and preservation of national treasure and historical and cultural heritage***

Pemerintah Rusia percaya bahwa salah satu tugas penting dari setiap negara dan masyarakat yang maju adalah pelestarian warisan sejarah dan budaya sebagai salah satu prinsip yang dapat menjamin keamanan dan kedaulatan nasional dari suatu negara. Jika budaya-budaya tersebut hilang, maka akan hilang juga makna dan tujuan Pembangunan dari suatu negara.

Warisan sejarah dan budaya, sebagai penyimpan memori sejarah, secara langsung turut serta membentuk kepribadian setiap manusia dan identitas kewarganegaraannya. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya berskala besar telah dilakukan di Rusia untuk mengesahkan berbagai inisiatif publik yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian ingatan sejarah. Kewajiban negara untuk melindungi kebenaran sejarahnya dan tidak dapatnya meremehkan pentingnya prestasi rakyat dalam mempertahankan Tanah Air diabadikan dalam Konstitusi Federasi Rusia. Versi baru Strategi Keamanan Nasional yang diadopsi pada tahun 2021 mendefinisikan penguatan nilai-nilai spiritual dan moral tradisional Rusia serta pelestarian warisan budaya dan sejarah rakyat Rusia menjadi kepentingan nasional pada saat ini.

Nilai-nilai tradisional Rusia sendiri didasarkan oleh adanya prinsip konservatif tentang kebenaran yang statis atau tidak dapat diubah. Nilai-nilai ini kemudian ditetapkan untuk dibagikan oleh semua orang, di mana saja dan kapan saja, yang berarti tidak ada spesifikasi tertentu yang dapat dikhususkan. Selain itu, karakternya yang abadi dan sakral berarti bahwa tidak ada upaya apa pun yang ditujukan untuk menerapkannya ke dalam suatu praktik tertentu di dalam negara, karena mereka dijamin oleh kehendak Tuhan (Stepanova, 2022).

b. Peran ajaran agama Kristen Ortodox dalam pembentukan hukum anti-LGBTQIA+ di Rusia

Dalam praktiknya, tradisi spiritual yang terjadi dalam ajaran Kristen ortodoks didasarkan pada hubungan antara anggota yang dikeramatkan dengan bapa/bapa pengakuannya, yang dapat memberikan atau menolak akses-akses terhadap sakramen-sakramen. Akibatnya, akses sakramen bisa jadi lebih longgar, dan kebijakan-kebijakannya tidak selalu ditegakkan dengan praktik yang konsisten dari satu wilayah ke wilayah lainnya (HRC, 2021). Ajaran Kristen Ortodoks (terutama *eastern orthodoxy*) adalah gereja yang konservatif secara sosial dengan ritual yang rumit serta hirarki yang ketat. Sebagian besar gereja Ortodoks diorganisir berdasarkan garis nasional, dengan beberapa gereja lainnya (gereja independen) yang memilih doktrin dan praktik kuno dalam basis ajarannya. Seperti badan-badan gereja internasional lainnya, Kristen Ortodoks telah menghadapi seruan untuk memberikan akseptansi terhadap kelompok LGBTQ+. meskipun tidak memiliki otoritas doktrinal tunggal seperti seorang paus, gereja Ortodoks telah bersatu dalam menentang pengakuan terhadap hubungan sesama jenis baik di dalam ritus-ritus mereka sendiri maupun di ranah sipil. Opini publik di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Ortodoks pun sebagian besar menentanginya (Smith & Litvinova, 2024).

Ajaran agama Kristen ortodoks memiliki peranan penting dalam pembentukan hukum dan kebijakan Rusia. Kebijakan mengenai kriminalisasi atau demonisasi kelompok LGBTQIA+ di Rusia sepenuhnya didukung oleh adanya peran ajaran agama Kristen Ortodox (Kislitsyna, 2020b). Dalam ajaran agama ortodoks sendiri mengajarkan bahwa hubungan yang terjalin antar dua individu sesama jenis merupakan suatu hal yang dilarang dan berdosa untuk dilakukan. Selain itu, ajaran agama ini juga berpendapat bahwa adanya hubungan seksual sesama jenis di tengah-tengah Masyarakat merupakan salah satu tanda dari hari akhir. Menurut *Russian Public Opinion Research Center*, pada tahun 2019, terdapat 63% penduduk Rusia yang menganut agama Kristen Ortodoks, dan mencapai 74% dalam populasi masyarakat yang berusia di atas 60 tahun. Mengingat adanya pengaruh yang kuat dari ajaran Kristen Ortodoks di mayoritas masyarakatnya, anggota

Parlemen Rusia kemudian melobi *Russian Orthodox Church* untuk memberikan dukungan dalam pembuatan undang-undang terkait *gay propaganda* (Kislitsyna, 2020a).

c. ***Scope of Interest* Rusia dalam agenda politik LGBTQIA+ secara Internasional**

Pemerintah Rusia membuat agenda LGBTQIA+ sebagai suatu hal yang krusial terutama dalam hal komunikasi politik ideologi melawan liberalisme Amerika Serikat. Terdapat beberapa alasan mengapa Rusia tidak ingin menyetujui atau melaksanakan seruan untuk akseptansi kelompok LGBTQIA+ di negaranya, di samping dari mempertahankan nilai-nilai tradisional serta keagamaan Rusia. Rusia telah mengambil sikap yang semakin tidak bersahabat terhadap hak-hak LGBTQIA+ dalam beberapa tahun terakhir, dengan menerapkan undang-undang dan kebijakan yang mendiskriminasi dan memarginalkan individu LGBTQIA+. Terdapat beberapa justifikasi yang menjadi klaim Rusia dalam menerapkan hukum-hukum tersebut, dan berupaya untuk menerapkannya secara Internasional, salah satunya dengan memberikan klaim bahwa akseptansi LGBTQIA+ merupakan bentuk pemaksaan nilai-nilai “Barat”, bentuk campur tangan asing dalam pemerintahan Rusia, serta memberikan “proteksi” akan nilai-nilai tradisional terhadap negara-negara pecahan Uni Soviet, atau negara-negara yang “telah ditakdirkan untuk bersatu” (de Groot, 2022), seperti Belarus dan Ukraina. Sehingga pada akhirnya, karena meluasnya pengaruh ideologi barat di Ukraina, konflik antara Rusia dan Ukraina pun pecah pada tahun 2022.

Aksi yang dilakukan Putin dalam menjaga nilai-nilai tradisional ini diperkuat dengan beberapa faktor lainnya, seperti ekspansi NATO secara geopolitik, dimana terdapat potensi keanggotaan Ukraina di dalamnya, serta meningkatnya keberpihakan Ukraina pada institusi-institusi Barat, seperti Uni Eropa dan NATO, yang juga dipandang sebagai sebuah kerugian strategis oleh Rusia. Kemudian seruan-seruan anti-LGBTQIA+ dilakukan oleh Rusia merupakan salah satu bentuk promosi dari nilai-nilai tradisional Rusia sebagai lawan dari ideologi barat atau akseptansi dari kelompok LGBTQIA+ di Ukraina, sekaligus menjadi motif atau justifikasi dari invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 (Serhan, 2023). Seruan yang dimaksud dalam konteks ini

adalah kriminalisasi kelompok LGBTQIA+, hingga pemberian label kelompok ekstremis bagi para pendukung atau anggota dari kelompok LGBTQIA+ baik di Rusia, maupun negara-negara lainnya. Hal ini juga menjadi suatu respons dari *speech act* Joe Biden pada tahun 2021 mengenai kriminalisasi negara-negara yang tidak ingin memberikan akseptansi terhadap kelompok LGBTQIA+.

D. Interaksi Rusia dan AS di dalam agenda politik LGBTQIA+

Rangkaian peristiwa yang terjadi mulai dari *speech act* oleh Joe Biden hingga babak baru dari ekspansi kebijakan anti-LGBTQIA+ Rusia telah cukup untuk menunjukkan bagaimana intensitas serta ketegangan iklim politik antar kedua negara dalam agenda politik LGBTQIA+ yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. AS memiliki keinginan untuk mencapai akseptansi LGBTQIA+ secara global, yang secara langsung dideklarasikan oleh Joe Biden dalam *Memorandum on Advancing the Human Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex around the world* sekaligus desakan untuk kriminalisasi negara-negara yang melakukan “diskriminasi” terhadap kelompok LGBTQIA+. Dalam konteks ini, dapat ditafsirkan bahwa Joe Biden memberi *highlight* terhadap apa yang dilakukan Rusia terhadap kelompok LGBTQIA+ yang ada di negaranya.

Setelah berakhirnya perang dingin, Russia dan AS masih memiliki intensi untuk mempromosikan sekaligus memberikan proteksi dari ideologi dari masing-masing negara, dimana Russia yang dominan dengan paham konservatifnya, serta AS dengan paham liberalnya. Rusia menganggap apa-apa saja yang dihasilkan oleh AS baik secara fisik dan non-fisik, sebagai sebuah ancaman, termasuk paham LGBTQIA+ yang sudah sejak lama dinilai sebagai “produk” barat. Hukum “*anti-gay propaganda*” menjadi salah satu senjata yang digunakan oleh Rusia untuk melawan salah satu ideologi barat yaitu LGBTQIA+. Sejak masa pemerintahan Stalin, setelah berakhirnya rezim partai komunis, Rusia (yang menjadi bagian dari Uni Soviet) kembali menetapkan hukum kriminalisasi homoseksualitas. Hukum ini terus menerus berlanjut dan berkembang, bahkan hingga saat ini. Beberapa waktu belakangan ini, Rusia di bawah pemerintahan Putin, memutuskan untuk memperketat atau mengInternasionalisasi tersebut, dimana hal ini menjadi salah satu bagian dari agenda sosial konservatif Putin (Grove, 2013). Secara langsung, agenda LGBTQIA+ AS memiliki dampak di berbagai aspek di Rusia, terutama pada aspek tensi diplomatik dan juga dampak secara kultural.

a. Tensi Diplomatik antar AS dan Rusia

Meskipun memiliki ideologi yang bertentangan, kedua negara ini masih terikat secara hubungan diplomatik yang ditandai oleh adanya bangunan kedutaan AS di Moscow, Rusia, dan bangunan kedutaan Rusia di Wisconsin Avenue, NW, Washington D.C, AS. Kedua negara juga memiliki berbagai kegiatan diplomatik di berbagai sektor terutama pada sektor *nuclear security*, nonproliferasi, keamanan regional Eropa dan Eurasia, serta perlawanan terhadap gerakan terorisme (U.S. DEPARTMENT OF STATE, 2010). Namun, hingga saat ini, Rusia memberikan label “unfriendly countries” terhadap AS. Daftar “*unfriendly countries*” ini dibuat berdasarkan perlakuan “tidak baik” negara-negara tersebut terhadap Rusia berdasarkan pada urusan diplomatik dan konsulat antar Rusia dan negara-negara tersebut (The Russian Government, 2022).

Setelah adanya deklarasi akseptansi kelompok LGBTQIA+ oleh Joe Biden pada tahun 2021, Rusia memberikan tanggapan yang jauh lebih negatif jika dibandingkan dengan respon-respon sebelumnya. Rusia memberikan pengetatan terhadap eksistensi kelompok LGBTQIA+ di negaranya. Jika sebelumnya Rusia hanya memberikan hukuman ringan terhadap individu-individu yang terkait dengan kelompok LGBTQIA+, dengan alasan untuk memberikan proteksi terhadap nilai-nilai tradisional dan juga melindungi anak-anak dari propaganda yang dianggap buruk oleh Rusia (Davis, 2023). Walaupun telah dikecam berkali-kali secara internasional, Rusia tetap tidak peduli dan memilih untuk melanjutkan untuk menginternasionalisasi LGBTQIA+ secara domestik dengan harapan bahwa hal ini dapat mengurangi pengaruh hegemoni AS atau ideologi liberalisme di Rusia, serta menjaga nilai-nilai tradisional di tengah-tengah masyarakat Rusia (Lemziakov & Litvinov, 2024).

Sebelum memorandum Joe Biden dideklarasikan, pada tahun 2020 Rusia sempat mendapat rekomendasi oleh UN Human Rights Committee untuk memerangi diskriminasi yang terjadi terhadap kelompok LGBTQIA+ atau secara spesifik dapat didefinisikan sebagai diskriminasi terhadap orientasi seksual dan identitas gender. Namun kemudian Rusia memberi klaim bahwa kebijakan yang ada di negaranya merupakan suatu simbol atau

pencerminan dari “norma-norma sosial yang sudah mapan” yang bertujuan untuk “melestarikan dan pengembangan untuk umat manusia” (The Advocates of Human Rights, 2022). Di tahun yang sama, pada bulan Juni yang bertepatan pada pride month, Kedutaan Amerika Serikat di Rusia mengibarkan bendera pelangi di depan kantor kedutaan Amerika Serikat yang menyimbolkan dukungan secara langsung untuk kelompok LGBTQIA+ sekaligus untuk menjalankan misi diplomatik AS bersamaan dengan kedutaan dan konsulat AS di seluruh dunia (Renkin & Trofimov, 2023).

Setahun setelah deklarasi memorandum perlindungan kelompok LGBTQIA+ secara global, pada tahun 2022, Invasi Rusia ke Ukraina terjadi, dimana pemerintah Rusia mengklaim bahwa perang ini merupakan bentuk dari perlindungan “nilai-nilai tradisional” dan perlawanan dari nilai-nilai Barat yang dianggap immoral, sekaligus menggunakan retorika anti-LGBTQIA+ sebagai bagian dari narasi invasi tersebut (Lemziakov & Litvinov, 2024). Invasi ini selanjutnya menjadi salah satu hal yang dikecam oleh AS, hingga setelahnya AS bersama dengan Uni Eropa memberikan sanksi berupa embargo ekonomi secara besar-besaran terhadap Rusia (European Council, 2023). Hal ini kemudian ditujukan untuk melemahkan Rusia agar menghentikan invasi tersebut.

Pada tahun 2023, saat embargo serta sanksi ekonomi lainnya masih berjalan, Rusia tetap memutuskan untuk memperketat hukum anti-LGBTQIA+ di negaranya dan memberi cap kelompok ekstremis terhadap kelompok LGBTQIA+, sehingga hukuman atau sanksi yang diberikan terhadap kelompok tersebut menjadi semakin berat (Burga, 2023). Bahkan hingga saat ini, Rusia tetap berdiri pada pendiriannya untuk tidak memberikan akseptansi sama sekali terhadap kelompok LGBTQIA+ di negaranya, dan menjunjung tinggi hakikat nilai-nilai tradisional negaranya, serta nilai dari ajaran agama Kristen Ortodoks dalam penegakan hukumnya. Di sisi lain, AS terus memberikan kecaman terhadap Rusia, di samping sanksi yang diberikan atas invasi terhadap Ukraina, AS juga berkali-kali memberikan *call out* terhadap Rusia atas diskriminasi yang saat ini terjadi di negaranya (Farber, 2023).

Secara garis besar, walaupun kedua negara memiliki hubungan diplomatik secara simbolis, tensi diantara keduanya masih cenderung besar, dan kedua negara tetap kukuh dengan hukum yang mereka miliki, dan tetap tidak peduli dengan berbagai *call out* atau bentuk kecaman antar satu sama lain. Namun kemudian, internasionalisasi LGBTQIA+ tersebut tidak berpengaruh secara besar dalam tensi diplomatik antar kedua negara. Perang Russia-Ukraina lah yang kemudian mengubah arah diplomatik antar kedua negara dan menurunkan intensitas kerja sama antar kedua negara (Novozhenina, 2024). Namun adanya internasionalisasi akseptansi LGBTQIA+ ini juga menjadi salah satu basis dari konflik Russia-Ukraina, dan mempengaruhi ketegangan hubungan diplomatik antara kedua negara. Saat ini terdapat beberapa perubahan dalam preferensi kerja sama antara kedua negara, salah satunya dalam aspek ekonomi (Bureau of European and Eurasian Affairs, 2024).

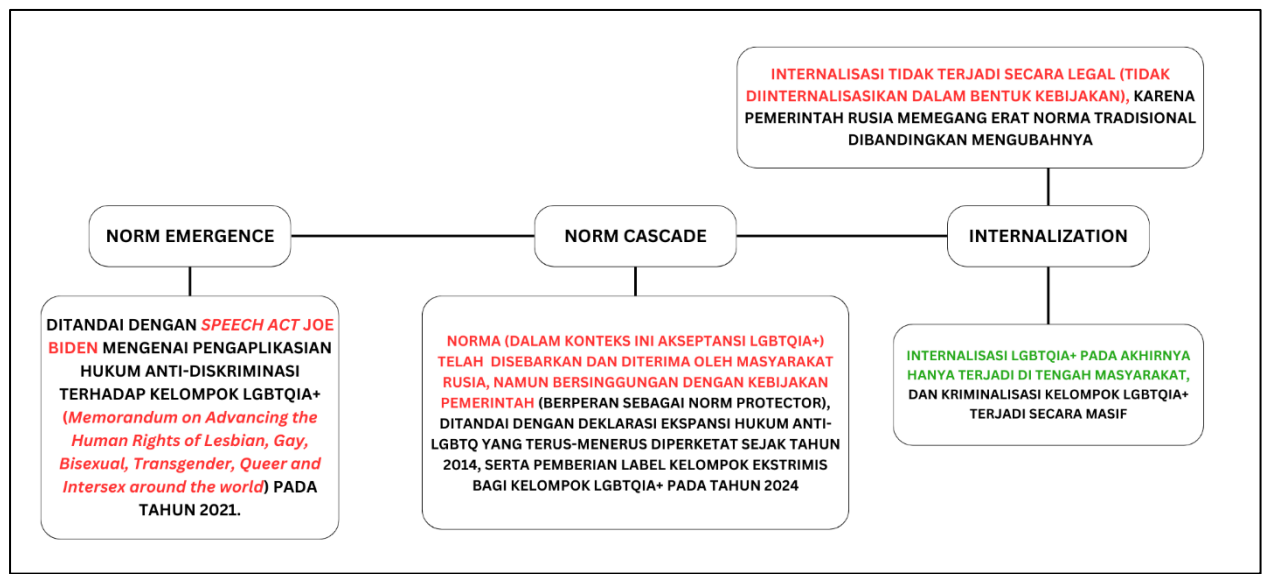
E. Interaksi AS dan Rusia dalam Teori Norm Life Cycle

Norma didefinisikan sebagai aturan perilaku yang diharapkan dalam suatu masyarakat atau sebagai perilaku yang umum dalam suatu Masyarakat (Morris-Martin et al., 2019). Menurut Finnemore dan Sikkink, Norma adalah segala suatu hal yang akan selalu berubah di tengah-tengah masyarakat seiring berjalannya waktu. Norma yang telah lama atau tidak sesuai dapat dicabut, digantikan dengan norma yang baru, atau dimodifikasi sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada saat itu (Frantz & Pigozzi, 2018). Segala macam interaksi yang terdapat dalam hubungan antar AS dan Rusia dalam agenda politik LGBTQIA+ dapat dikaitkan dengan teori *norm life cycle* yang dikemukakan oleh Finnemore dan Sikkink. Teori ini menunjukkan tahapan bagaimana sebuah norma dapat masuk ke dalam suatu kelompok melalui adanya sistem multi agen dalam proses penyebaran norma tersebut.

Finnemore dan Sikkink menjelaskan bahwa norma dapat disebar melalui 3 tahap, yaitu *emergence*, *cascade*, dan *internalization*. Dalam tahap pertama, aktor atau agen-agen ini (dapat disebut sebagai *norm entrepreneur*) akan memperkenalkan norma yang mereka miliki terhadap masyarakat umum. *Norm entrepreneur* kemudian membujuk massa untuk mendukung norma-norma baru atau mengubah norma-norma yang sudah ada diantara masyarakat tersebut untuk mencapai perilaku yang diinginkan dalam suatu negara atau komunitas. Jika dikaitkan dengan studi kasus yang terdapat

pada penelitian ini, hal ini dapat dikaitkan dengan AS (yang berperan sebagai *norm entrepreneur*) dalam penyebaran ide akseptansi kelompok LGBTQIA+ secara global, terutama terhadap negara-negara konservatif seperti Rusia.

Gambar 2. Keselarasan Interaksi antara Amerika Serikat dan Rusia dalam agenda politik LGBTQIA+ dan teori Norm Life Cycle



Sumber: penulis

Walaupun sebelumnya agenda akseptansi LGBTQIA+ ini sudah ada sejak beberapa dekade sebelum memorandum akseptansi yang telah dideklarasikan oleh Joe Biden, bentuk akseptansi terhadap kelompok LGBTQIA+ hanya terjadi secara domestik atau di negara-negara bagian AS saja. Dengan adanya *Memorandum on Advancing the Human Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex around the world* pada tahun 2021, menjadi suatu penanda dan seruan bahwa LGBTQIA+ harus diterima dalam lingkup global, tidak peduli dengan status negara tersebut. Memorandum ini dapat digambarkan sebagai salah satu bentuk dari suatu norma, dimana norma yang dimaksud adalah akseptansi kelompok LGBTQIA+ secara global. Joe Biden yang berperan sebagai *norm leader* mengajak massa untuk menyetujui adanya akseptansi kelompok LGBTQIA+ di sekitar mereka dan mengecam keras atas adanya tindakan diskriminasi baik dari individu, kelompok, atau bahkan negara.

Sebelum menuju ke tahap *cascade*, sebuah norma tidak akan langsung diterima atau disosialisasikan terhadap Masyarakat. Terdapat *tipping point* yang merupakan

bentuk dari adanya pertentangan dan perselisihan yang terjadi di antara masyarakat, atau perdebatan mengenai akseptansi norma tersebut. Mengingat 74% dari penduduk Rusia beragama Kristen Ortodoks, dapat dikatakan bahwa membawa atau mengajak Masyarakat tersebut untuk menyetujui adanya akseptansi LGBTQIA+ tentunya tidak akan berjalan semudah itu, karena menurut ajaran agama Kristen Ortodoks, LGBTQIA+ adalah suatu dosa dan perbuatan yang tidak pantas untuk dilegalkan. Oleh karena itu, pastinya akseptansi kelompok ini akan menjadi suatu hal yang sulit di tengah-tengah masyarakat Kristen Ortodoks yang konservatif. Namun kemudian, dengan adanya seruan-seruan tertentu, serta masuknya LSM-LSM barat ke dalam Masyarakat Rusia yang dapat memberikan sosialisasi norma atau akseptansi kelompok LGBTQIA+ secara baik, pada akhirnya akseptansi tersebut dapat tercapai di antara masyarakat Rusia, walaupun dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal secara hukum pada akhirnya. Dalam konteks ini, dapat diartikan bahwa tahapan *tipping point* dalam *norm life cycle* berhasil dilewati, maka selanjutnya suatu norma akan berada dalam tahap *cascade*.

Dalam tahap *cascade* dapat diartikan bahwa Masyarakat sudah mengenal norma tersebut, namun belum tersosialisasikan secara baik. Oleh karena itu, *norm entrepreneur* akan memberikan sosialisasi dan berbagai cara untuk mengajak massa agar dapat mengakseptansi norma yang dibawakan. Mekanisme semacam persuasi dapat dilakukan oleh suatu aktor/agen tertentu kepada pihak yang seharusnya menerima norma tersebut (Frantz & Pigozzi, 2018). Dalam konteks negara, bujukan atau persuasi tersebut akan bersandar pada kebutuhan negara untuk diakui sebagai anggota dari organisasi Internasional, mengingat adanya keinginan negara untuk mempertahankan posisinya di ranah Internasional. Adanya peran dari LSM-LSM atau NGO-NGO LGBTQIA+ AS yang berperan untuk menyuarakan akseptansi LGBTQIA+ terhadap Masyarakat Rusia, untuk mendapatkan simpati serta akseptansi di antara massa. Kemudian dapat ditelaah bahwa akseptansi LGBTQIA+ yang terdapat di tengah-tengah Masyarakat Russia dapat dicapai melalui adanya konsep *mass democracies*. Dalam konteks *mass democracies*, kelompok marjinal atau kelompok yang terpinggirkan akan mencari cara untuk menarik opini kelompok mayoritas atau massa untuk mengamankan hak-hak mereka. Salah satu strategi yang biasanya digunakan oleh kelompok tersebut adalah *respectability politics*, di mana dalam strategi ini, kelompok tersebut menunjukkan bahwa mereka bukan kelompok yang hadir untuk menolak norma yang

ada di tengah-tengah masyarakat, melainkan hadir sebagai kelompok yang turut mengikuti norma dan aturan, tidak memberikan ancaman dan berperilaku “pantas”. Dari strategi tersebut, kelompok terpinggirkan ini berharap bahwa kelompok dominan/mayoritas akan melihat kesamaan dengan kelompok yang terpinggirkan dan akhirnya menganggap mereka dapat memiliki hak yang sama. Selain itu, kelompok-kelompok ini biasanya akan menyoroati anggota-anggota mereka yang paling dihormati seperti tokoh-tokoh penting dan menekankan bagaimana mereka mengikuti nilai-nilai yang ada pada kelompok yang dominan (Jones, 2022). Kelompok LGBTQIA+ yang ada di Russia cenderung menunjukkan dan menyuarakan bahwa mereka pada dasarnya adalah bagian dari masyarakat yang tunduk terhadap aturan, dan beraktivitas seperti individual dan masyarakat secara umum (Beyrer et al., 2018).

Walaupun norma berhasil disosialisasikan bahkan dinormalisasikan di tengah-tengah masyarakat, norma tersebut tidak semata-mata diterima oleh pemerintah Rusia secara baik. Pemerintah Rusia sangat teguh dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional serta keagamaan dalam penegakan hukumnya, sehingga akseptansi LGBTQIA+ dianggap sebagai suatu hal yang tidak wajar, dan melenceng jauh dari norma yang sudah ada. Dapat dikatakan bahwa pemerintah Rusia tidak dapat menerima adanya norma tersebut, sehingga normalisasi ini hanya terjadi di Masyarakat dan tidak terjadi secara hukum atau *legal law*. Oleh karena itu, pada akhirnya internalisasi atau tahap ketiga dalam *norm life cycle* menurut Finnemore dan Sikkink hanya terjadi di level Masyarakat saja, dan kemudian tidak semua masyarakat dapat menerima kehadiran kelompok LGBTQIA+ di tengah-tengah Masyarakat yang konservatif.